

TUGAS PORTOFOLIO

MATA KULIAH PEMERIKSAAN AKUNTANSI

(Disusun guna menyelesaikan tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi)

Dosen Pengampu:

Dr. Pujiati, M.Pd.

Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak, Ak., CA.



Disusun Oleh:

Muhammad Rizqi Alfiah 2313031008

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

ANALISIS JURNAL

Identitas Jurnal 1

Judul Jurnal	Analisis Audit Operasional Persediaan Barang Dagang (Kasus Pada Lpg Non Subsidi Pada Pt. Harapan Panca Sukma – Bandar Lampung)
Jenis Jurnal	Jasiora
Penulis	Novalita & Rahmiati
Tahun Terbit	2021
Volume	Vol 2
Nomor	No 4
Halaman	81-93

Hasil Analisis

Setiap perusahaan selalu memerlukan persediaan dalam rangka menjaga kontinuitas produksi, tanpa adanya persediaan perusahaan akan dihadapkan pada resiko bahwa perusahaannya suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan konsumen (Rangkuti, 2007). Pada perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor, persediaan menjadi salah satu komponen penting dalam kegiatan penjualan. Kegiatan penjualan perusahaan akan terus berlangsung selama perusahaan memiliki persediaan yang cukup.

Persediaan merupakan aktiva lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah diselewengkan oleh para pejabat dan karyawan serta setiap harinya bagian kepala gudang PT. Harapan Panca Sukma melakukan penerimaan barang dan pengiriman barang kepelanggan, oleh karena itu persediaan barang dagang harus diawasi dengan benar, baik dari segi penerimaan barang maupun dari segi pengeluaran barang. Audit operasional merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menguji dan menilai kekayaan maka, kebutuhan akan adanya suatu audit operasional dalam penyelenggaraan kegiatan PT. Harapan Panca Sukma sangat penting sekali. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan mengenai sifat persediaan barang dagang yang penting dan rawan bagi perusahaan maka perlu diadakannya audit operasional terhadap persediaan barang dagang.

Temuan dan Rekomendasi yang diperoleh dari Audit Operasional terhadap Persediaan Barang Dagang :

1. Untuk persediaan Bright Gas 5,5kg nilai stock akhir dibulan September 2020 sangat besar dikarenakan terjadinya transaksi pembelian barang persediaan tanpa melihat sisa stock yang masih ada di gudang, sehingga belum efisien dan efektif.
2. Untuk persediaan Elpiji 50kg terjadi perputaran yang lambat dalam bulan September 2020, dan jarang terjadi transaksi pengeluaran barang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit operasional atas persediaan barang dagang yang dilakukan pada PT. Harapan Panca Sukma sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan audit atas persediaan barang. Secara umum sudah dilaksanakan audit operasional atas persediaan barang dagang terhadap pemasukan dan pengeluaran barang tetapi ada persediaan barang yang overstock.
- 2) Temuan auditor
 - a) Untuk persediaan Bright Gas 5,5kg nilai stock akhir dibulan September 2020 sangat besar dikarenakan terjadinya transaksi pembelian barang persediaan tanpa melihat sisa stock yang masih ada di gudang, sehingga menyebabkan persediaan barang menumpuk digudang.
 - b) Untuk persediaan Elpiji 50kg terjadi perputaran yang lambat dalam bulan September 2020, dan jarang terjadi transaksi pengeluaran

Sebagai rekomendasi dari Audit Operasional Persediaan Barang Dagang

- a) Sebaiknya untuk Bright Gas 5,5kg lebih diperhatikan untuk pembelian barang karena jika stock persediaan digudang masih banyak jangan melakukan pembelian barang, sehingga tidak terjadi overstock dan penumpukan barang di gudang.
- b) Sebaiknya dibuat suatu promosi atau program untuk penjualan Elpiji 50 kg agar dapat lebih laku dipasaran sehingga terjadi perputaran persediaan yang baik.

ANALISIS JURNAL

Identitas Jurnal 2

Judul Jurnal	Pengaruh Opini Audit, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay
Jenis Jurnal	Jurnal Syntax Transformation
Penulis	Fitri Sulmi, Hamrul, dan Anita Nopiyanti
Tahun Terbit	2020
Volume	Vol 1
Nomor	No 8
Halaman	453-463

Hasil Analisis

Jurnal ini membahas pengaruh opini audit, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap audit delay. Audit delay merupakan keterlambatan waktu antara berakhirnya tahun buku perusahaan dengan diterbitkannya laporan audit oleh auditor. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sangat penting karena menjadi sumber informasi bagi investor dan pihak luar perusahaan dalam mengambil keputusan. Jika laporan keuangan terlambat dipublikasikan, hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap kondisi perusahaan.

Berdasarkan ketentuan OJK No.44/POJK.04/2016, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit wajib disampaikan maksimal 90 hari setelah akhir tahun buku. Apabila proses audit berlangsung terlalu lama, perusahaan dapat mengalami keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangannya di pasar modal.

Penelitian ini menjelaskan bahwa beberapa faktor yang diduga memengaruhi audit delay adalah opini audit, komite audit, dan ukuran perusahaan. Opini audit merupakan penilaian auditor mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap lamanya proses audit karena auditor tetap menggunakan prosedur pemeriksaan yang sama pada setiap perusahaan, baik memperoleh opini wajar tanpa pengecualian maupun opini lainnya.

Komite audit juga dibahas sebagai pihak yang membantu pengawasan penyusunan laporan keuangan. Semakin baik pengawasan dari komite audit, maka penyusunan laporan keuangan akan lebih sesuai dengan standar akuntansi. Meskipun demikian, proses penyelesaian audit tetap berada di tangan auditor sehingga komite audit tidak terlalu berpengaruh secara langsung terhadap audit delay.

Selain itu, ukuran perusahaan yang dilihat dari total aset juga tidak terbukti memengaruhi audit delay. Perusahaan besar maupun kecil tetap menjalani prosedur audit yang sama sesuai standar audit yang berlaku. Auditor dituntut bekerja profesional tanpa membedakan ukuran perusahaan, sehingga waktu penyelesaian audit tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya aset perusahaan.

ANALISIS JURNAL

Identitas Jurnal 3

Judul Jurnal	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan Teknis, Dan Perencanaan Penugasan Audit Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pada Organisasi Sektor Publik
Jenis Jurnal	Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Penulis	Zulfadli Abidin, Nadirsyah & Her Fahlevi
Tahun Terbit	2020
Volume	Vol 5
Nomor	No 1

Hasil Analisis

Pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menjadi manifestasi dari pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks tersebut, terdapat tiga aspek keberhasilan yang mendukung terbentuknya pemerintahan yang baik, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan (Mardiasmo, 2005).

Kualitas audit sangat bergantung pada dua faktor utama, yaitu kemampuan auditor dalam menguji akun-akun, dan objektivitas melalui independensinya (De Angelo, 1981). Oleh karena itu, De Angelo mendefinisikan kualitas audit sebagai kemampuan auditor untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau kecurangan dalam sistem informasi akuntansi klien.

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan organisasi sektor publik, manajemen keuangan organisasi harus dijalankan secara tertib, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan prinsip rasa keadilan serta kesesuaian dengan norma yang berlaku.

Hal ini diperlukan pengendalian serta pengawasan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta tujuan organisasi sektor publik yaitu audit pada sektor publik. Proses pengujian ini memungkinkan akuntan publik independen yang bersertifikasi mengeluarkan suatu pendapat atau opini mengenai seberapa baik laporan keuangan organisasi mewakili posisi keuangan organisasi sektor publik dan apakah laporan keuangan memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

Audit sektor publik di Indonesia dikenal dengan nama audit keuangan negara. Hal ini diatur sesuai dengan Undang-undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Audit sektor publik adalah suatu proses sistematis secara objektif yang dilakukan untuk menguji keakuratan dan kelengkapan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan organisasi sektor publik. Melalui proses pengujian ini, akuntan publik independen yang bersertifikasi dapat memberikan pendapat atau opini mengenai sejauh mana laporan keuangan organisasi mencerminkan posisi keuangan sektor publik dan apakah laporan tersebut mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, yaitu Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

Standar audit merupakan tingkat minimal yang harus dipatuhi dalam menjalankan kegiatan audit, yang ditetapkan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menyatakan bahwa standar audit berperan penting bagi auditor APIP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka.

Menurut Government Accountability Office (GAO), kualitas audit didefinisikan sebagai tingkat kepatuhan terhadap standar dan kewajiban kontraktual selama proses audit berlangsung (Lawensohn, et al:2007). Kualitas audit juga mencakup pelaporan mengenai kelemahan dalam pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Audit dapat dikatakan berkualitas jika hasil audit dapat ditindaklanjuti oleh auditi. Hal ini dapat terlaksana pada sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi audit tersebut.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas audit, yaitu: keakuratan temuan audit; sikap skeptisisme; nilai rekomendasi; kejelasan laporan audit; manfaat audit; dan tindak lanjut hasil audit. Pendidikan merupakan proses memperoleh pengetahuan, yang biasanya terdiri dari jenjang pendidikan yang seseorang jalani. Pengetahuan ini didapat dari disiplin ilmu yang dikuasai, yang membentuk sikap dan karakter individu dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Djoyonegoro, 2000). Pendidikan formal, di sisi lain, merupakan serangkaian tahapan pendidikan yang telah ditetapkan secara resmi, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), setiap pemeriksa atau auditor harus mengikuti pelatihan pendidikan selama minimal 80 jam setiap 2 tahun, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional secara langsung. Setidaknya 24 jam dari total 80 jam pendidikan tersebut harus berkaitan langsung

dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan pemerintah. Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan berkelanjutan bagi para pemeriksa atau auditor dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pemeriksaan keuangan negara.

Menurut Hery (2013) kegagalan dalam merencanakan penugasan audit secara tepat dapat menyebabkan penerbitan laporan audit yang keliru atau audit menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Ada lima indikator dalam perencanaan penugasan audit yaitu:

- 1) Pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor public
- 2) Penentuan tujuan dan lingkup audit
- 3) Penilaian risiko
- 4) Penyusunan rencana audit (audit plan)
- 5) Penyusunan program audit.

ANALISIS JURNAL

Identitas Jurnal 4

Judul Jurnal	Pengaruh Pemeriksaan Internal dan Tanggung Jawab Auditor Internal Terhadap Efektifitas Pengendalian Piutang.
Jenis Jurnal	Jurnal Akresi
Penulis	Damaris Marpaung
Tahun Terbit	2021
Volume	Vol 1
Nomor	No 1
Halaman	33-44

Hasil Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemeriksaan internal dan tanggung jawab auditor internal terhadap efektivitas pengendalian piutang. Penelitian ini menggunakan data primer yang dilakukan dengan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi lapangan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang berasal dari kalangan tingkat Manajer Divisi, Audit internal dan beberapa karyawan divisi. Hasil dari penelitian ini yang didapatkan secara parsial adalah, pemeriksaan internal memiliki tingkat signifikansi. Dengan demikian pemeriksaan internal berpengaruh tetapi, tidak secara signifikan terhadap efektivitas pengendalian piutang. Sedangkan, tanggung jawab auditor internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengendalian piutang. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Pengaruh pemeriksaan Internal dan tanggung jawab Auditor internal terhadap efektivitas Pengendalian piutang tidak berpengaruh secara signifikan.

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan rofes teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern berfungsi untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian intern adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengantisipasi kecurangan dan mengantisipasi kemungkinan piutang tak tertagih, dengan adanya pengendalian piutang dapat meminimalisasi kerugian yang diakibatkan piutang tak tertagih. Pengendalian intern perusahaan merupakan suatu cara organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menjaga aset, memberikan informasi yang akurat, mendorong mematuhi peraturan dan ketentuan manajemen yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pekerjaan audit internal harus mencakup pemeriksaan dan

evaluasi atas kecukupan serta efektivitas rofes pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Amin (2015:18). Kaitannya dengan ruang lingkup pekerjaan, Menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dalam standard Audit Intern Pemerintah Indonesia (2013:26) disebutkan bahwa: Agar sasaran audit internal tercapai, maka auditor internal harus menetapkan ruang lingkup penugasan pekrjaan yang memadai. Ruang lingkup audit tersebut meliputi aspek keuangan dan operasional auditee oleh karena itu, auditor internal harus memeriksa semua buku, catatan, laporan, aset maupun personalia untuk memeriksa kinerja auditee pada periode yang diperiksa. Sebelum analisis data dan pengujian digunakan untuk mengambil data primer melalui kuesioner, rofession penelitian dapat diuji terlebih dahulu analisis data dengan tujuan untuk memperoleh, mengolah dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para responden agar bersifat valid dan reliable, maka peneliti menggunakan pengujian sebagai berikut: uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, asumsi klasik rofessio baik itu multikolinieritas, autokorelasi, dan tereroskesdastisitas. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang tekah dilakukan terhadap permasalahan pada penelitian ini dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh pemeriksaan internal tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian piutang. Seharusnya semakin besar peran pemeriksaan internal dalam suatu perusahaan maka akan semakin meningkat pula efektivitas pengendalian piutang. Namun berdasarkan hasil penelitian dari responden yang memberikan tanggapan belum merasakan dampak yang diberikan oleh divisi pemeriksaan internal. Dimana pemeriksaan internal dalam perusahaan ini masih kurang sesuai pelaksanaannya dengan pernyataan dalam kuesioner sehingga responden memberikan tanggapan yang berbeda-beda dari hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa pemeriksaan internal didalam perusahaan PT. Adipurna Mranata Jaya belum efektif dan belum memberikan kontribusi terhadap piutang.
2. Hasil pengujian analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistic tanggung jawab auditor internal tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian piutang. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai faktor misalnya saja responden belum merasakan dampak dari tanggung jawab auditor internal sesuai dengan pernyataan dalam kuesioner sehingga responden memberikan tanggapan yang berbeda. Selain itu faktor yang lain adanya ketentuan dalam proses pemberian penjualan kredit yang ditetapkan.

ANALISIS JURNAL

Identitas Jurnal 5

Judul Jurnal	Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, Kualitas Audit, Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Bank BCA Area Medan
Jenis Jurnal	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi
Penulis	Glenardy, Michael Romi, Ricky, dan Bayu Wulandari
Tahun Terbit	2022
Volume	Vol 13
Nomor	No 1
Halaman	210-221

Hasil Analisis

Jurnal ini membahas pengaruh audit internal, pengendalian internal, kualitas audit, dan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pada sektor perbankan, khususnya di Bank BCA Area Medan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di dunia perbankan sehingga diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian yang baik untuk meminimalkan terjadinya fraud.

Audit internal memiliki peran penting karena berfungsi sebagai pemeriksaan independen yang membantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Melalui audit internal, perusahaan dapat memperoleh informasi yang akurat untuk mendukung pengawasan dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Selain itu, pengendalian internal juga diperlukan sebagai sistem yang mengatur dan mengawasi setiap aktivitas perusahaan agar berjalan sesuai prosedur dan dapat mencegah terjadinya kesalahan maupun kecurangan.

Kualitas audit turut menjadi faktor penting dalam pencegahan fraud. Audit yang berkualitas dapat membantu auditor menemukan kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan sehingga laporan yang dihasilkan lebih dapat dipercaya. Dalam prosesnya, auditor harus menjalankan tugas sesuai standar audit dan kode etik profesi agar hasil pemeriksaan tetap objektif dan akurat.

Selain itu, *good corporate governance* juga berperan besar dalam mengurangi potensi kecurangan. Tata kelola perusahaan yang baik diterapkan melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Dengan penerapan prinsip

tersebut, perusahaan dapat menciptakan sistem kerja yang lebih tertib, efektif, dan terbuka sehingga risiko fraud dapat ditekan.

Jurnal ini juga menjelaskan bahwa keberhasilan audit internal, pengendalian internal, kualitas audit, dan *good corporate governance* sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Jika pihak perusahaan maupun auditor memiliki kemampuan, integritas, dan etika yang baik, maka proses pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan kasus kecurangan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, audit yang dilakukan secara berkala serta sikap profesional dari setiap individu menjadi hal penting dalam mencegah terjadinya fraud di perusahaan.

ANALISIS JURNAL

Identitas Jurnal 6

Judul Jurnal	Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengetahuan, Pengalaman Kerja, Integritas Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018)
Jenis Jurnal	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi
Penulis	Yohana Ariska Sihombing dan Dedik Nur Triyanto
Tahun Terbit	2019
Volume	Vol 9
Nomor	No 2

Hasil Analisis

Jurnal ini membahas pengaruh independensi, objektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, dan integritas terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel demi mewujudkan good governance dan clean governance. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang kompeten, independen, dan mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.

Dalam penelitian dijelaskan bahwa APIP memiliki tugas melakukan pengawasan intern melalui kegiatan audit, evaluasi, pemantauan, dan review terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Barat pernah memperoleh penghargaan atas kualitas laporan keuangannya, masih ditemukan kasus korupsi yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan terhadap independensi dan kompetensi auditor internal pemerintah.

Independensi menjadi faktor penting dalam proses audit karena auditor harus mampu memberikan penilaian secara objektif tanpa dipengaruhi pihak lain. Selain itu, auditor juga dituntut memiliki objektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, dan integritas agar mampu mendeteksi kesalahan maupun kecurangan dalam laporan keuangan. Pengetahuan dan pengalaman kerja membantu auditor memahami proses pemeriksaan dengan lebih baik, sedangkan integritas berkaitan dengan kejujuran dan tanggung jawab auditor dalam menjalankan profesinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama independensi, objektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, dan integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun secara parsial, hanya independensi yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sementara itu, objektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, dan integritas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara langsung.

Penelitian ini juga memberikan saran agar Inspektorat Provinsi Jawa Barat terus meningkatkan kemampuan auditor, terutama dalam aspek objektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, dan integritas. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti etika auditor dan due professional care serta menggunakan metode penelitian yang lebih luas agar hasil yang diperoleh lebih lengkap dan akurat.

ANALISIS JURNAL

Identitas Jurnal 7

Judul Jurnal	Pengaruh Peran Audit Internal dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada PT. Tolan Tiga Indonesia)
Jenis Jurnal	Riset & Jurnal Akuntansi
Penulis	Suginam
Tahun Terbit	2017
Volume	Vol 1
Nomor	No 1

Hasil Analisis

Jurnal ini membahas pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada PT. Tolan Tiga Indonesia. Fraud dijelaskan sebagai tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dan dapat merugikan pihak lain. Dalam praktiknya, fraud tidak hanya dilakukan oleh karyawan, tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak manajemen sehingga diperlukan sistem pengawasan yang baik untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Penelitian ini menjelaskan bahwa fraud yang dilakukan manajemen biasanya lebih sulit terdeteksi dibandingkan fraud yang dilakukan karyawan. Beberapa tanda yang menunjukkan adanya fraud manajemen antara lain rendahnya moralitas pimpinan, tingginya keluhan dari pihak luar, motivasi kerja karyawan yang rendah, serta adanya kelebihan persediaan barang. Sementara itu, fraud yang dilakukan karyawan dapat terlihat dari transaksi tanpa dokumen pendukung, faktur ganda, selisih persediaan, hingga penghilangan dokumen perusahaan.

Audit internal memiliki peran penting sebagai alat pengawasan dalam perusahaan. Audit internal bertugas menilai efektivitas pengendalian internal serta membantu manajemen melalui analisis, penilaian, dan rekomendasi untuk memperbaiki kegiatan perusahaan. Selain itu, audit internal juga membantu memastikan bahwa kebijakan perusahaan telah dijalankan sesuai aturan dan kekayaan perusahaan dapat dijaga dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, auditor internal memiliki beberapa peran, yaitu sebagai watchdog, konsultan, dan katalis. Sebagai watchdog, auditor bertugas mengawasi kepatuhan terhadap aturan dan menemukan penyimpangan dalam pengendalian

internal. Sebagai konsultan, auditor membantu manajemen memberikan solusi dan saran dalam pengelolaan perusahaan. Sedangkan sebagai katalis, auditor memberikan masukan yang dapat membantu perkembangan perusahaan tanpa terlibat langsung dalam kegiatan operasional.

Selain audit internal, pengendalian internal juga menjadi faktor penting dalam pencegahan fraud. Pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang untuk menjaga aset perusahaan, memastikan kegiatan berjalan sesuai prosedur, dan meminimalkan risiko terjadinya kecurangan. Dengan audit internal dan pengendalian internal yang berjalan efektif, perusahaan dapat meningkatkan pengawasan dan mengurangi kemungkinan terjadinya fraud.

ANALISIS ARTIKEL

Identitas Artikel Berita 8

Judul Artikel	Ditemukan Pelanggaran pada Audit Laporan Keuangan Garuda, Izin AP Kasner Sirumapea Dibekukan
Penulis	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Penerbit
Tahun Terbit	2019
Kemenkeu Link	https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/ditemukan-pelanggaran-pada-audit-laporan-keuangan-garuda,-izin-ap-kasner-sirumapea-dibekukan

Hasil Analisis

Berita tersebut menerangkan Pada konferensi pers yang digelar bersama Otoritas Jasa Keuangan kemarin (28/6/2019), Kementerian Keuangan mengumumkan sanksi yang dijatuhkan pada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan atas kesalahan audit pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018.

Laporan Keuangan Tahunan Garuda tersebut dinyatakan cacat setelah ditemukan fakta bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan terkait kerjasama yang dilakukan dengan PT Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan diterima Garuda setelah penandatanganan perjanjian sehingga hal tersebut berdampak pada Laporan Laba Rugi Garuda. Melihat hal ini, dua komisaris Garuda tidak turut menandatangani Laporan Keuangan 2018 tersebut.

Berikut ini analisis saya terkait kasus audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 ini dan mengaitkannya pada materi auditing.

1) Pelanggaran SA 315 (Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material)

Dalam melakukan audit, auditor wajib memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Dalam kasus Garuda, auditor gagal mengidentifikasi risiko terkait pengakuan pendapatan dari perjanjian dengan PT Mahata Aero Teknologi sebagai area risiko tinggi. Seharusnya auditor mempertimbangkan beberapa risiko seperti kompleksitas transaksi, adanya unsur subjektivitas dalam pengakuan pendapatan, serta tren/tekanan kinerja keuangan Garuda. Pengakuan pendapatan adalah area yang rawan risiko salah saji material, sehingga auditor perlu menaruh perhatian

khusus. Kegagalan auditor dalam penilaian risiko ini berpotensi mengakibatkan prosedur audit yang tidak memadai.

2) Pelanggaran SA 500 (Bukti Audit)

Auditor harus mendapatkan bukti audit yang memadai (cukup) dan relevan (tepat) untuk menarik kesimpulan yang menjadi dasar dalam memberikan opini audi. Dalam kasus Garuda, auditor sepertinya gagal mendapatkan bukti audit yang memadai terkait pengakuan pendapatan tersebut. Auditor seharusnya melakukan pengujian substantif dengan memeriksa dokumen pendukung seperti kontrak perjanjian, perhitungan pengakuan pendapatan, pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak, serta melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga jika diperlukan. Namun auditor tidak menemukan ketidaksesuaian pengakuan pendapatan dengan standar akuntansi yang berlaku.

3) Pelanggaran SA 560 (Peristiwa Kemudian)

SA 560 mengatur bagaimana auditor mempertimbangkan peristiwa kemudian dalam auditnya. Dalam kasus ini, auditor tidak mempertimbangkan secara memadai peristiwa penting setelah tanggal laporan keuangan, yaitu penolakan dua komisaris Garuda untuk menandatangani laporan keuangan tersebut. Penolakan komisaris ini merupakan indikasi adanya permasalahan dalam laporan keuangan yang seharusnya ditindaklanjuti auditor. Auditor wajib melakukan prosedur audit tambahan dan mungkin perlu merevisi opini auditnya jika bukti audit menunjukkan adanya salah saji material.

4) Pelanggaran SA 700 (Perumusan Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan)

Sebagai konsekuensi dari pelanggaran SA lainnya, opini audit yang diberikan auditor atas laporan keuangan Garuda menjadi tidak tepat. SA 700 mengatur bagaimana auditor merumuskan opini audit berdasarkan bukti audit yang diperoleh. Dalam kasus ini, auditor seharusnya memberikan opini selain opini wajar tanpa pengecualian, seperti opini wajar dengan pengecualian atau bahkan opini tidak wajar. Opini audit yang tidak tepat dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi.

5) Sistem Pengendalian Mutu KAP

Selain pelanggaran SA, Kementerian Keuangan juga menemukan bahwa KAP belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal, terutama terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Standar Pengendalian Mutu KAP yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Pengendalian mutu KAP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personelnnya mematuhi standar publicasional dan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu elemen pengendalian mutu adalah konsultasi, di mana KAP harus memastikan personelnnya melakukan konsultasi dengan pihak yang memiliki keahlian dan

sumber daya yang memadai jika dibutuhkan. Kegagalan dalam menerapkan pengendalian mutu ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas audit yang dilakukan oleh KAP. Hal ini dapat berdampak pada kepercayaan public terhadap profesi akuntan public.

6) Sanksi dan Dampak

Atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, pihak regulator yaitu Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi yang cukup berat. Sanksi tersebut meliputi pembekuan izin Akuntan Publik, peringatan tertulis dan kewajiban perbaikan sistem pengendalian mutu KAP, denda bagi Garuda dan manajemennya. Sanksi ini penting untuk menegakkan standar profesi dan memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang. Namun, dampak lebih luas juga perlu diperhatikan, seperti turunnya kepercayaan public terhadap laporan keuangan Garuda dan profesi akuntan public secara umum. Kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi auditor dan KAP untuk selalu mematuhi standar audit, menerapkan pengendalian mutu, serta menjaga integritas dan independensi dalam memberikan opini audit yang berkualitas. Hal ini penting untuk memelihara kepercayaan public terhadap profesi akuntan public dan laporan keuangan yang diaudit.

ANALISIS JURNAL

Identitas Jurnal 9

Judul Jurnal	Pengaruh Penyusunan Kertas Kerja Audit terhadap Kualitas Laporan Audit Bidang Instansi Pemerintah Pusat pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara
Jenis Jurnal	Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik
Penulis	Renny Maisyarah
Tahun Terbit	2019
Volume	Vol 9
Nomor	No 2
Halaman	85-97

Hasil Analisis

Menurut Mulyadi (2013:11) auditing :suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2011) dijelaskan bahwa dalam melakukan penugasan umum, auditor ditugasi memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Opini yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha dan arus kas sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang akan diberikan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat, sebagai pihak yang independen, auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepentingan siapapun dan untuk tidak mudah dipengaruhi, serta harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak memiliki suatu kepentingan dengan kliennya (IAI, 2011).

Opini auditor memiliki 5 tipe, yaitu Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion report), Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (unqualified opinion report with explanatory language), Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion report), Pendapat tidak wajar (adverse pinion report), dan Pendapat tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion report). Kertas Kerja Audit (KKA) adalah catatan (dokumentasi) yang dibuat oleh auditor mengenai bukti-

bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur audit yang diterapkan, serta simpulan-simpulan yang dibuat selama melaksanakan audit (Pusiklatwas BPKP-2009). Dalam pengertian dokumentasi yang dibuat oleh auditor adalah berupa dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh auditor, baik yang dibuat sendiri maupun dokumen yang berupa fotocopi/salinan (auditor's copy) yang diperoleh auditor selama pelaksanaan audit. Sumber dokumen KKA dapat berasal dari auditi, pihak di luar auditi/instansi lainnya, maupun dari pihak auditor.

Kertas kerja audit memiliki tiga jenis, yaitu KKA Utama (Top Schedule), KKA Ikhtisar, KKA Pendukung (Supporting Schedule). Tujuan dibuatnya kertas kerja pemeriksaan yaitu sebagai pendukung laporan audit, dokumentasi informasi, identifikasi dan dokumentasi temuan audit, pendukung pembahasan, media review pengawas, bahan pembuktian, referensi, membantu auditor ekstern, dan sarana pengendalian mutu. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) melalui Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Nomor 01 Tahun 2007 menyatakan definisi kualitas hasil pemeriksaan yaitu: "Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatuhan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggungjawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam lampiran 3 SPKN disebutkan bahwa: "Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud. Jika manajemen tidak memiliki cara semacam itu, pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan" (paragraf 17).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial kertas kerja audit berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan audit, hal ini dapat dilihat bahwa kertas kerja audit memiliki nilai signifikansi 0,000 yang berarti nilai ini lebih kecil dari

0,05, sedangkan nilai t hitung 13,915 > t tabel 2,040. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dalam melakukan audit sangat berpengaruh terhadap kertas kerja dalam hal menghasilkan audit yang berkualitas. Kertas kerja audit dimanfaatkan oleh auditor untuk menghubungkan catatan klien dengan laporan audit yang dihasilkan oleh auditor, untuk mendukung pendapat dan merupakan bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit yang memadai, dan juga untuk mengkoordinasikan dan mengorganisasikan. Kualitas laporan audit yang dihasilkan oleh auditor tidak tujuan penting dalam pembuatan kertas kerja yaitu: mendukung pendapat auditor atas laporan auditan, mengemukakan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi audit, mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahapan audit, serta memberikan pedoman dalam auditan berikutnya.

ANALISIS JURNAL

Identitas Jurnal 10

Judul Jurnal	<i>Artificial Intelligence in Internal Audit as a Contribution to Effective Governance</i>
Jenis Jurnal	<i>Research Platform Alexandria</i>
Penulis	Marco Schreyer, Marcel Baumgartner, T. Flemming Ruud, Damian Borth
Tahun Terbit	2022
Volume	Vol Special: Internal Audit
Nomor	No 1
Halaman	39-44

Hasil Analisis

Perkembangan teknologi informasi terkini, seperti cloud computing, artificial intelligence (AI), dan Internet of Things (IoT) mengakibatkan sejumlah besar upaya perusahaan untuk mendigitalkan proses bisnis secara bertahap. Transformasi ini juga mempengaruhi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dan mengubah pengumpulan bukti audit. Saat ini, sistem ERP menangkap volume lengkap informasi audit yang relevan, seperti entri jurnal, log proses, atau konfigurasi pemisahan tugas. Pada saat yang sama, sifat dan cakupan data perusahaan yang direkam memungkinkan penerapan prosedur audit digital yang inovatif, yang menjanjikan untuk secara signifikan meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit internal.

Secara umum, AI bertujuan untuk memodelkan kemampuan kognitif kecerdasan manusia untuk menyelesaikan tugas-tugas intelektual dengan cara belajar mandiri. Sub-disiplin AI yang menonjol mencakup bidang pembelajaran mesin (ML). Istilah ML mengacu pada metodologi yang memberikan komputer kemampuan untuk mempelajari model untuk menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Sub-disiplin ML yang berhasil disebut Deep Learning (DL). Secara umum, DL menunjukkan teknik pembelajaran yang terinspirasi secara biologis oleh struktur dan fungsi otak manusia untuk meniru perilaku cerdas.

Dalam konteks audit internal, umumnya diasumsikan bahwa aktivitas yang salah atau curang merupakan kasus luar biasa yang menyimpang dari pola perilaku perusahaan. Aktivitas menyimpang tersebut dicatat oleh sebagian kecil entri jurnal yang menunjukkan nilai atribut "anomali". Penerapan teknik DL memungkinkan auditor untuk memperoleh model non-linier yang tepat dari karakteristik entri jurnal. Karakteristik dapat diamati dari banyaknya nilai atribut entri jurnal yang berbeda,

misalnya karena sejumlah besar vendor yang diposting, akun buku besar atau jenis dokumen, dan banyaknya korelasi nilai atribut entri jurnal yang berbeda, misalnya jenis dokumen yang biasanya di posting dalam kombinasi dengan kunci posting tertentu dan akun buku besar umum. Saat ini, penerapan AI dan teknik ML tertentu muncul sebagai alat berharga yang dapat digunakan dalam berbagai fase proses audit. Selanjutnya, adopsi bertahap dari prosedur audit yang diaktifkan AI dapat diamati oleh auditor internal. Akibat penerapan AI, audit internal saat ini menghadapi sejumlah tantangan baru, seperti tanggung jawab hukum, privasi data, dan kepatuhan model. Guna mewujudkan tata kelola yang efektif, salah satunya melalui penggunaan kecerdasan buatan dalam audit internal. Kita ketahui bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini diciptakan untuk dapat melakukan berbagai tugas dengan kecerdasannya. Artinya, kecerdasan buatan ini diciptakan untuk membantu manusia.

Artificial Intelligence (AI) merupakan pemanfaatan big data dan algoritma dalam pengambilan keputusan. Semakin besar data, maka hasil yang dicapai akan semakin akurat, untuk itulah big data menjadi sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu model pengambilan keputusan. Internal audit mempunyai 5 area kritis berkaitan dengan aktivitas AI pada organisasi (Tutor Akuntansi FEB UB, 2018), yaitu:

1. Memasukkan komponen penggunaan AI dalam penilaian risiko bahkan sejak dimulainya perencanaan kegiatan audit berbasis risiko.
2. Internal audit harus ikut serta dalam proyek-proyek institusi yang terkait penggunaan AI, tidak harus mengimplementasikannya, namun paling tidak mengatur dan bertanggung jawab terhadap hasil yang diraih dari penggunaan AI tersebut.
3. Penggunaan AI dalam lingkup pekerjaan institusi tidak lantas menghilangkan risiko. Internal audit harus bisa memberikan assurance terhadap risiko yang mungkin didapat serta dari algoritma AI yang digunakan.
4. Memperhatikan lingkungan institusi dimana AI diimplementasikan agar berdaya guna baik, dari segi moral dan etika.
5. Apabila AI governance (salah satu komponen AI Auditing Framework) telah dibentuk dalam suatu institusi, maka peran internal audit harus dapat memberikan assurance yang memadai.